

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2020

**Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi -
Sekjen**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi - Sekjen adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi - Sekjen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi - Sekjen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jambi, 12 Juli 2021

Kepala Kanwil Kemenag Jambi

H. Zoztafia, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197201071997031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi - Sekjen tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, 12 Juli 2021

Kepala Kanwil Kemenag Jambi

H. Zoztafia, S.Ag, M.Pd.I

NRP. 197201071997031004

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi - Sekjen Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp178.535.152 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp178.535.152 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.231.179.217 atau mencapai 96,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp40.578.972.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp98.155.422.061 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp83.273.685; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp97.475.933.799 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp596.214.577.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp45.061.000 dan Rp98.110.361.061

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.765.464 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp41.663.398.415 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-41.661.632.951, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp13.152.236 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-41.648.480.715.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp103.409.139.084, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-41.648.480.715 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -2.411.961.003 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 38.761.663.695 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp98.110.361.061

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

DAFTAR TABEL

- 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
- 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 4 Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 5 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 6 Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2020
- 8 Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 9 Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 10 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2020
- 11 Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 12 Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 17 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	Catatan	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	178.535.152	-	212.452.143
JUMLAH PENDAPATAN		-	178.535.152	-	212.452.143
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	24.349.165.000	23.963.357.769	98,42	25.461.318.764
Belanja Barang	B.2.2	14.709.807.000	13.754.697.048	93,51	18.518.759.959
Belanja Modal	B.2.3	1.520.000.000	1.513.124.400	99,55	2.080.357.050
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		40.578.972.000	39.231.179.217	96,68	46.060.435.773

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	1.765.464	1.727.806
Jumlah Pendapatan		1.765.464	1.727.806
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	23.954.371.769	25.507.670.764
Beban Persediaan	D.4	709.814.095	817.578.895
Beban Barang dan Jasa	D.5	7.875.384.609	9.687.304.352
Beban Pemeliharaan	D.6	4.075.833.017	4.064.413.843
Beban Perjalanan Dinas	D.7	1.068.782.112	3.929.934.669
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	3.979.212.813	4.689.252.116
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		41.663.398.415	48.696.154.639
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(41.661.632.951)	(48.694.426.833)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(23.593.039)	(2.285.715)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	36.745.275	211.099.037
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		13.152.236	208.813.322
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(41.648.480.715)	(48.485.613.511)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(41.648.480.715)	(48.485.613.511)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	103.409.139.084	104.652.003.373
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(41.648.480.715)	(48.485.613.511)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(2.411.961.003)	8.821.235.507
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	(2.658.338.731)	8.987.638.800
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	227.651.033	(166.403.293)
Koreksi Lain-Lain	E.46	18.726.695	-
Jumlah		(2.411.961.003)	8.821.235.507
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	38.761.663.695	38.421.513.715
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(5.298.778.023)	(1.242.864.289)
EKUITAS AKHIR	E.6	98.110.361.061	103.409.139.084

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

U R A I A N	Catatan	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	83.273.685	59.800.550
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		83.273.685	59.800.550
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.21	20.524.140.996	19.917.093.221
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	40.802.254.643	39.719.428.243
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	79.559.577.676	82.729.284.426
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	2.291.683.048	2.291.683.048
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	4.301.736.470	4.301.736.470
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(50.003.459.034)	(46.238.054.852)
Jumlah Aset Tetap		97.475.933.799	102.721.170.556
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	2.259.629.668	2.395.344.668
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(1.663.415.091)	(1.684.402.995)
Jumlah Aset Lainnya		596.214.577	710.941.673
JUMLAH ASET		98.155.422.061	103.491.912.779
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	45.061.000	82.773.695
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		45.061.000	82.773.695
JUMLAH KEWAJIBAN		45.061.000	82.773.695
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	98.110.361.061	103.409.139.084
JUMLAH EKUTAS		98.110.361.061	103.409.139.084
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		98.155.422.061	103.491.912.779

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI - SEKJEN

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi - Sekjen. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan 2020 periode 31 Desember ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah 2020 yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua adalah 5 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wilayah	Satker	Jumlah dan Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1							
Jumlah							

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI yang merupakan entitas pelaporan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi - Sekjen. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagas Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan

Pendapatan-LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	Anggaran Awal 2020	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	23.279.763.000	24.349.165.000
Belanja Barang	13.998.575.000	14.709.807.000
Belanja Modal	-	1.520.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	37.278.338.000	40.578.972.000

Realisasi Pendapatan
Rp178.535.152

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp178.535.152 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi - Sekjen terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp178.535.152. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Realisasi Pendapatan berasal dari pengembalian belanja Pegawai, belanja modal, pembelian barang kendaraan roda dua dan roda empat, pendapatan atas sewa rumah.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	178.535.152	-
Jumlah	-	178.535.152	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 15,96 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	178.535.152	212.452.143	(15,96)
Jumlah	178.535.152	212.452.143	(15,96)

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2020 sebesar 0,00 dari TA 2019 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp178.535.152 dan Rp212.452.143. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami penurunan sebesar 15,96 dari TA 2019 PNBPN Tahun 2019 berasal dari pengembalian Belanja Barang atas temuan BPK RI, Pengembalian Belanja Pegawai atas kelebihan *Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	178.535.152	212.452.143	(15,96)
Jumlah	178.535.152	212.452.143	(15,96)

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	138.614.333	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.765.464	1.727.806	2,18
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau	3.000.000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	7.322.750	6.633.124	10,40
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	24.917.494	204.091.213	(87,79)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2.915.111	-	-
Jumlah	178.535.152	212.452.143	(15,96)

B.2 Belanja

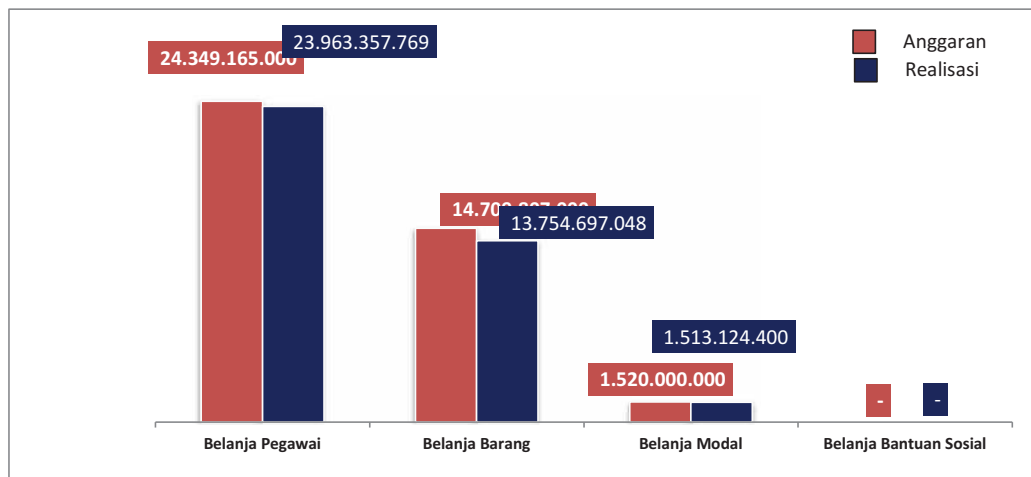
Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp39.231.179.217 atau 96,68 % dari anggaran belanja sebesar Rp40.578.972.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2020

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	24.349.165.000	23.963.357.769	98,42
Belanja Barang	14.709.807.000	13.754.697.048	93,51
Belanja Modal	1.520.000.000	1.513.124.400	99,55
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	40.578.972.000	39.231.179.217	96,68

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 14,83% Pagu belanja tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 karena adanya relokasi pusat penghematan penanganan covid-19 dan Refocusing anggaran.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Pegawai	23.963.357.769	25.461.318.764	(5,88)
Belanja Barang	13.754.697.048	18.518.759.959	(25,73)
Belanja Modal	1.513.124.400	2.080.357.050	(27,27)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	39.231.179.217	46.060.435.773	(14,83)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp23.963.357.769

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp23.963.357.769 dan Rp25.461.318.764. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar 5,88 % dari TA 2019. Hal ini disebabkan Realisasi TA. 2020 menurun karena ada mutasi pegawai dan pegawai pensiun.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Gaji Pokok PNS	9.832.060.760	9.919.288.600	(0,88)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	134.849	168.206	(19,83)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	765.391.542	777.209.254	(1,52)
Belanja Tunj. Anak PNS	270.220.026	271.351.248	(0,42)
Belanja Tunj. Struktural PNS	387.154.000	376.470.000	2,84
Belanja Tunj. Fungsional PNS	448.417.000	381.605.000	17,51
Belanja Tunj. PPh PNS	79.706.229	91.552.317	(12,94)
Belanja Tunj. Beras PNS	543.005.160	555.244.140	(2,20)
Belanja Uang Makan PNS	1.806.824.100	1.599.960.065	12,93
Belanja Tunjangan Umum PNS	338.090.000	360.950.000	(6,33)
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	60.000.000	39.735.000	51,00
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	9.000.000	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	24.028.152.443	25.471.320.513	(5,67)
Pengembalian Belanja Pegawai	64.794.674	10.001.749	547,83
Jumlah Belanja	23.963.357.769	25.461.318.764	(5,88)

Realisasi Belanja
Barang
Rp13.754.697.048

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.754.697.048 dan Rp18.518.759.959. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 25,73% dari Realisasi TA 2019.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan karena adanya penghematan dalam rangka Covid-19

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Barang Operasional	6.163.990.764	5.862.162.027	5,15
Belanja Barang Non Operasional	637.300.100	1.661.008.425	(61,63)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	771.753.900	837.107.095	(7,81)
Belanja Jasa	1.074.093.745	2.167.282.450	(50,44)
Belanja Pemeliharaan	4.083.868.389	4.064.413.843	0,48
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.068.782.112	3.934.237.269	(72,83)
Jumlah Belanja Kotor	13.799.789.010	18.526.211.109	(25,51)
Pengembalian Belanja	45.091.962	7.451.150	505,17
Jumlah Belanja	13.754.697.048	18.518.759.959	(25,73)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp284.487.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp281.085.600 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2020

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	279.387.000	278.339.600	99,63
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.600.000	1.246.000	34,61
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.500.000	1.500.000	100,00
Jumlah Belanja	284.487.000	281.085.600	98,80

Realisasi Belanja Modal
Rp1.513.124.400

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.513.124.400 dan Rp2.080.357.050. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar 27,27% dibandingkan TA 2019 disebabkan oleh Belanja Modal TA. 2020 menurun dibanding TA. 2019.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.097.826.400	677.587.050	62,02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	415.298.000	1.402.770.000	(70,39)
Jumlah Belanja Kotor	1.513.124.400	2.080.357.050	(27,27)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.513.124.400	2.080.357.050	(27,27)

Realisasi Belanja Modal Tanah
Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh TA. 2020 ada koreksi kesalahan input IP pada Kemenag Kab. Batanghari sebesar Rp.537.313.000,- serta hibah masuk untuk Kementerian Agama Kab. Tebo sebesar Rp.69.734.775,- dari Pemda Kab. Tebo seluas 6.135m². Hal inilah yang menambah nilai tanah di tahun 2020..

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp1.097.826.400

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.097.826.400 dan Rp677.587.050, mengalami kenaikan sebesar 62,02 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Pembelian peralatan dan mesin TA. 2020 Meningkat dibanding TA. 2019, Pembelian berupa 159 unit komputer yaitu di Kanwil Kemenag Prov. Jambi sebanyak 8 unit, Kemenag Kota Sungai Penuh sebanyak 8 unit, Kemenag Tanjab Barat sebanyak 15 unit, Kemenag Kab. Merangin sebanyak 13 unit, Kemenag Kab. Ma. Jambi sebanyak 4 unit, Kemenag Kab. Tanjab Timur sebanyak 11 unit dan Kemang Kab. Sarolangun sebanyak 4 unit. 162 unit peralatan rumah tangga untk Kemenag Kota Sungai Penuh sebanyak 7 unit, Kanwil Kemang Prov. Jambi sebanyak 29 unit, Kemenag Tanjab Barat 5 unit, Kemenag Kab. Merangin sebanyak 7 unit, Kemenag Kab. Ma. Jambi sebanyak 3 unit, Kemenag Kab. Tanjab Timur sebanyak 13 unit dan Kemenag Kab. Sarolangun 34 unit. dan 5 unit alat studio komunikasi dan pemancar, tersebar di Kemenag Kab. Merangin sebanyak 1 unit, Kemang Kab. Tanjab Timur 4 unit..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.097.826.400	677.587.050	62,02
Jumlah Belanja Kotor	1.097.826.400	677.587.050	62,02
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.097.826.400	677.587.050	62,02

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp415.298.000

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp415.298.000 dan Rp1.402.770.000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar 70,39% dibandingkan Realisasi TA 2019. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Gedung dan Bangunan TA. 2020 Pengembangan melalui KDP pada Kemenag Kab. Tebo sebesar Rp.164.500.000,-, di Kemang Kab. Muaro Jambi sebesar Rp.162.798.000,- serta Koreksi IP di Kemang Kab. Batanghari sebesar Rp.63.630.240,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164.500.000	593.213.000	(72,27)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	250.798.000	809.557.000	(69,02)
Jumlah Belanja Kotor	415.298.000	1.402.770.000	(70,39)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	415.298.000	1.402.770.000	(70,39)

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2020 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2019. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Untuk Realisasi Anggaran TA. 2020 menurun dibanding TA. 2019 karena Indonesia sedang dalam masa pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan-kegiatan outdoor dibatasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta pagu anggaran di alihkan untuk penanganannya covid-19.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1.765.464

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.765.464 dan Rp1.727.806. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2,18. Hal tersebut disebabkan oleh PNPB Tahun 2020 naik sebesar Rp. 37.658,- atas sewa rumah dinas di Kab. Merangin.. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.765.464	1.727.806,00	2,18
Jumlah	1.765.464,00	1.727.806,00	2,18

Beban Pegawai
Rp23.954.371.769

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp23.954.371.769 dan Rp25.507.670.764.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar 6,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Penurunan terjadi karena ada pegawai yang memasuki masa pensiun dan relokasi tunjangan kinerja ke-14 untuk penanganan pandemi covid-19. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Gaji Pokok PNS	9.832.060.760	9.917.066.910	(0,86)
Beban Pembulatan Gaji PNS	134.265	153.840	(12,72)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	765.391.542	777.209.254	(1,52)
Beban Tunj. Anak PNS	270.220.026	271.351.248	(0,42)
Beban Tunj. Struktural PNS	381.973.160	376.470.000	1,46
Beban Tunj. Fungsional PNS	448.232.000	381.605.000	17,46
Beban Tunj. PPh PNS	79.706.229	91.552.317	(12,94)
Jumlah	23.954.371.769	25.507.670.764	(6,09)

Beban Persediaan
Rp709.814.095

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp709.814.095 dan Rp817.578.895

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 13,18 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Persediaan konsumsi	709.814.095	817.578.895	(13,18)
Jumlah Beban Persediaan	709.814.095,00	817.578.895	(13,18)

Beban Barang dan Jasa
Rp7.875.384.609

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.875.384.609 dan Rp9.687.304.352.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 18,70 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Penurunan karena relokasi untuk penanganan pandemi covid-19. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Keperluan Perkantoran	4.421.396.542	4.366.297.077	1,26
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.300.000	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.639.622	5.041.400	130,88
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.345.485.000	1.437.210.000	(6,38)
Beban Barang Operasional Lainnya	103.830.000	51.080.000	103,27
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	278.339.600	-	-
Beban Bahan	309.802.100	425.306.425	(27,16)
Beban Honor Output Kegiatan	36.600.000	402.100.000	(90,90)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.351.000	125.502.000	(98,13)
Jumlah	7.875.384.609	9.687.304.352,00	(18,70)

Beban Pemeliharaan
Rp4.075.833.017

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.075.833.017 dan Rp4.064.413.843.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban Pemeliharaan gedung dan bangunan di Kanwil Kementerian Agama prov. Jambi. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.302.864.537	1.126.998.389	15,60
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.762.968.480	2.873.215.454	(3,84)
Beban Pemeliharaan Jaringan	10.000.000	64.200.000	(84,42)
Jumlah	4.075.833.017	4.064.413.843	0,28

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.068.782.112

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.068.782.112 dan Rp3.929.934.669

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 72,80 persen disebabkan oleh Penurunan Beban perjalana dinas karena pengurangan perjadiin akibat pandemi covid-19. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Perjalanan Biasa	894.752.112	2.188.983.329	(59,12)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.250.000	93.259.800	(32,18)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	110.780.000	1.647.691.540	(93,28)
Jumlah	1.068.782.112,00	3.929.934.669	(72,80)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp3.979.212.813

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.979.212.813 dan Rp4.689.252.116.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	912.532.133	1.181.948.879	(22,79)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.750.422.816	3.247.468.021	(15,31)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	255.719.695	192.507.546	32,84
Beban Penyusutan Irigasi	11.803.260	11.803.261	(0,00)
Beban Penyusutan Jaringan	28.310.669	29.421.901	(3,78)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dig	20.424.240	26.102.508	(21,75)
Jumah Penyusutan	3.979.212.813	4.689.252.116	(15,14)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	3.979.212.813	4.689.252.116	(15,14)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp-23.593.039

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-23.593.039 dan Rp-2.285.715

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	138.614.333	-	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(162.207.372)	(2.285.715,00)	6.997
Jumlah	(23.593.039,00)	(2.285.715)	932

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp36.745.275

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp36.745.275 dan Rp211.099.037.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	7.322.750	6.633.124,00	10,40
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	24.917.494	204.091.213,00	(87,79)
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2.915.111	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(3.834.700)	(682.800,00)	462
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	2.424.620	1.057.500,00	129
Jumlah	33.745.275,00	211.099.037	(84,01)

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2020 dan 2019

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	278.339.600	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.246.000	-	-
Jumlah	279.585.600,00	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus,

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Pendapatan Negara Bukan Pajak di TA. 2020 meningkat karena penjualan lelang kendaraan roda dua dan roda empat pada Kanwil Kementerian Agama Prov. Jambi dan ganti rugi atas hilangnya 1 unit kendaraan roda dua di Kanwil Kementerian Agama Prov. Jambi.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp103.409.139.084,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.103.409.139.084,00 dan Rp.104.652.003.373,00

*Defisit LO Rp.-
41.648.480.715,00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.-41.648.480.715,00 dan Rp.-48.485.613.511,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-2.411.961.003 dan Rp.8.821.235.507 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.-2.658.338.731,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-2.658.338.731,00 dan Rp.8.987.638.800,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2020

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Revaluasi Aset Tetap	(2.658.338.731)
Jumlah	(2.658.338.731,0)

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp227.651.033

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	219.507.317
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	8.143.716
Jumlah	227.651.033,0

Koreksi Lain-Lain
Rp18.726.695

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.18.726.695 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2020

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	18.726.695
Jumlah	18.726.695,0

Transaksi Antar Entitas
Rp38.761.663.695

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.38.761.663.695 dan Rp.38.421.513.715. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2020

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	39.231.179.217
Diterima dari Entitas Lain	(178.535.152)
Transfer Keluar	(1.206.412.145)
Transfer Masuk	835.697.000
Pengesahan Hibah Langsung	79.734.775
Jumlah	38.761.663.695

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DKEL sebesar Rp 39.231.179.217, sedangkan DDEL sebesar Rp 178.535.152

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp-1.206.412.145 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2020

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp835.697.000 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2020

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp98.110.361.061*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.98.110.361.061,00 dan Rp.103.409.139.084,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-
Jumlah	120.000.000	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

kas di BP yang sudah dibelaniakan adalah sebesar 20.000.000

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Satuan Kerja

No	Kode satker	Nama Satker	Jumlah
		Jumlah	-

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Uang Muka Belanja (prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Keterangan	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	1.000.000	0,5%	5.000
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	1.000.000		5.000

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Jenis	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan
(Audited) TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Jenis	TAHUN 2020	TAHUN 2019
-	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp83.273.685

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp83.273.685 dan Rp59.800.550. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Jenis	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
Barang Konsumsi	83.273.685	59.800.550
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	83.273.685	59.800.550

Persediaan tersebut di atas dalam

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2020. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Debitur	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Debitur	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2020 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

U R A I A N	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2020 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2020 dan 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp20.524.140.996

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp20.524.140.996 dan Rp19.917.093.221. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	19.917.093.221
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	354.118.021
Saldo per 31 Desember 2020	19.562.975.200

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2020

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp40.802.254.643

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp40.802.254.643 dan Rp39.719.428.243. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	39.719.428.243
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	5.913.205.824
Saldo per 31 Desember 2020	33.806.222.419
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(38.670.485.116)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	(4.864.262.697)

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp79.559.577.676

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp79.559.577.676 dan Rp82.729.284.426. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	82.729.284.426
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	99.645.000
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2020	82.828.929.426
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(9.506.023.266)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	73.322.906.160

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.291.683.048

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.2.291.683.048 dan Rp.2.291.683.048. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	2.291.683.048
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per	2.291.683.048
Akumulasi Penyusutan s.d.	(975.155.732)
Nilai Buku per	1.316.527.316

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp4.301.736.470

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.4.301.736.470 dan Rp.4.301.736.470. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	4.301.736.470
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2020	4.301.736.470
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(851.794.920)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	3.449.941.550

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister
Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	4.622.728.112
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2020	4.622.728.112

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp50.003.459.034

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp50.003.459.034 dan Rp46.238.054.852. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2020

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	40.802.254.643	(38.670.485.116)	2.131.769.527
2	Gedung dan Bangunan	79.559.577.676	(9.506.023.266)	70.053.554.410
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.291.683.048	(975.155.732)	1.316.527.316
4	Aset Tetap Lainnya	4.301.736.470	(851.794.920)	3.449.941.550
	Akumulasi Penyusutan	126.955.251.837	(50.003.459.034)	76.951.792.803

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2020

No	U r a i a n	Jumlah
-		-
	Jumlah	-

Aset Tak Berwujud Rp0 **C.34 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi - Sekjen berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2020	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0 **C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per	-

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0 **C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2020	T.A. 2019
Dana Lainnya	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0 **C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri**

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2020	T.A. 2019
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain
Rp2.259.629.668

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp2.259.629.668 dan Rp2.395.344.668. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2020	2.395.344.668
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.351.653.824
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2020	8.746.998.492
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	(1.663.415.091)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	7.083.583.401

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 1.663.415.091

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp1.663.415.091 dan Rp1.684.402.995. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Lain-lain	2.259.629.668	(1.663.415.091)	596.214.577
Total	2.259.629.668	(1.663.415.091)	596.214.577

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp45.061.000

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp45.061.000 dan Rp82.773.695. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	45.061.000	82.773.695
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Total	45.061.000	82.773.695

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

dgsdfgfdsg

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

9afhasgdfgsdafsgdhaf

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2019
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :
berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A.2019
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :
jjhkjhgcjghcghckj

Ekuitas Rp98.110.361.061

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp98.110.361.061. dan Rp103.409.139.084. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

Aset Lancar berupa persediaan bertambah di banding tahun sebelumnya, aset tetap mayoritas bertambah kecuali gedung dan bangunan. Kewajiban utang kepada pihak ke tiga untuk pembayaran uang makan bulan Desember 2020.